



Penataan Kawasan Kumuh Jadi PR

■ Pemkot Fokus Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPK) Kota Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kawasan kumuh di wilayah ini. Menurut SK kumuh tahun 2021, ada 94 hektar kawasan kumuh di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPK Kota Yogyakarta, Sigit Setawan, mengatakan, mayoritas skor kumuh di Kota Yogyakarta berkisar 16 hingga 18. Dengan skor tersebut, kawasan kumuh di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori kumuh ringan.

"Di Kota Yogyakarta masih ada 94 hektar yang masuk kawasan kumuh. Kebanyakan skornya 16 sampai 18, masuknya kumuh ringan," katanya, Minggu (16/1).

Ada tujuh indikator kawasan kumuh yang saat ini diterapkan, seperti sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penanganan sampah, tata bangunan, proteksi kebakaran, dan lainnya. Umumnya kawasan kumuh di Kota Yogyakarta terkendala pada drainase dan sanitasi.

Hal itu karena rumah warga masih berada di pinggir sungai dan limbah rumah tangga masih dibuang ke sungai. "Sebagian besar warga yang rumahnya di pinggir sungai limbahnya masuk sungai. Karena nggak punya *septic tank*. Rumahnya kan mepet-mepet. Makanya perlu mundur dulu tiga meter. Nanti dimanfaatkan untuk jalan lingkungan dan sanitasi," terangnya.

Tahun ini tidak ada kegiatan pengurangan kawasan kumuh. Sebab tahun ini pihaknya fokus pada pengurangan skor kumuh di Preggan, Kotagede. "Tahun ini untuk pengurangan kumuhnya nol. Untuk lokasi kumuh tidak ada kegiatan. Tapi ada kegiatan pemuntasan lokasi kumuh SK tahun

MENATA WILAYAH

- DPUPK Kota Yogyakarta masih memiliki PR untuk mengurangi kawasan kumuh.
- Menurut SK kumuh tahun 2021, ada 94 hektar kawasan kumuh di Kota Yogyakarta.
- Pengurangan kawasan kumuh akan dilaksanakan pada 2023.
- Saat ini Pemkot fokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 dan fokus pemulihan ekonomi.

2014 di Preggan seluas 3 hektar," sambungnya.

Meski demikian, pengurangan kawasan kumuh akan dilaksanakan pada 2023. "Kalau yang menjadi kewenangan kota akan dianggarkan pada 2023 nanti. Kalau nanti yang jadi kewenangan pusat akan kami usulkan ke pusat, termasuk ke provinsi," imbuhnya.

Sementara itu, Pemkot saat ini tengah fokus pada penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi sepanjang tahun anggaran 2022 ini. Fleksibilitas yang masih sangat terbatas, otomatis membuat eksekutif urung mengalokasikan pengadaaan tanah untuk publik.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogyakarta, Wahyu Handoyo, mengatakan, satu-satunya jalan untuk pengadaaan tanah adalah melalui perubahan anggaran. Pasalnya, proposal yang diajukan masyarakat untuk dibeli pemerintah kini menumpuk, dan harus ditindaklanjuti.

"Harapan kami, di perubahan nanti, struktur anggarannya lebih fleksibel, lebih luasa. Sehingga, kami dapat kembali merealisasi-

kan pengadaaan tanah," ungkap Wahyu.

Proposal penawaran

Dia menjelaskan, sejauh ini terdapat lebih kurang 80 proposal penawaran tanah dari penduduk, yang masuk ke instansinya. Akan tetapi, pihaknya belum bisa memastikan, lahan mana yang diprioritaskan untuk dibeli. Sebab, Dispetaru harus menyesuaikan dengan rencana pemanfaatan lahannya.

"Ini harus cermat. Misal, dari penyebaran kewilayahannya. Kemudian dari sisi kebutuhan, apakah untuk fasilitas umum, atau ruang terbuka. Setelah itu, dari sisi pengelolaan, serta pemanfaatan tanahnya di kemudian hari," tandasnya.

Di samping untuk pengadaaan ruang terbuka hijau publik (RTHP), proposal yang diajukan warga masyarakat tersebut, terdapat pula yang untuk fasilitas lain, mulai dari gedung pertemuan, atau Balai RW, yang tidak kalah krusial.

"Idealnya, luas lahan yang dibeli pemerintah minimal 300 meter persegi. Dengan luasan segitu, pemanfaatannya nanti bisa lebih luasa, ya, apakah untuk membuat ruang terbuka hijau, maupun fasilitas umum publik," cetus Wahyu.

Pada tahun 2021, Pemkot Yogyakarta menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar untuk pengadaaan tanah. Anggaran itu, masing-masing untuk ruang terbuka hijau di Kemantren Wirobrajan. Dipaparkannya, realisasi fasilitas publik tersebut dibayai lewat APBD murni.

"Kemudian, RTHP Preggan dan tanah calon Puskesmas Gondomanan, lewat perubahan anggaran. Kegiatan paling besar untuk lahan di Jalan Ibu Ruswo, itu kedepannya akan dimanfaatkan jadi Puskesmas Gondomanan. Anggaran kemarin sampai Rp 27 miliar," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005